



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT
DINAS PERHUBUNGAN



LKJIP

DINAS PERHUBUNGAN DAERAH



TAHUN 2022

- www.dishub.sulbarprov.go.id
- dishubsulbar
- Dishub Prov Sulbar

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Esa, atas curahan nikmat dan karuniaNYA kepada kita sehingga penyusunan salah satu dokumen penting yaitu **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)** Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 dapat terselesaikan. Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini merupakan amanah dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang wajib disampaikan oleh penyelenggara pemerintahan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat ini berisikan gambaran capaian kinerja program kegiatan dan capaian kinerja anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan dokumen perencanaan yang dicapai dalam kurung waktu satu tahun.

Harapan kami bahwa Dinas Perhubungan bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sulawesi Barat melalui program dan kegiatan yang telah disusun dan dicapai yang akhirnya membawa Provinsi Sulawesi Barat menjadi Provinsi yang **maju dan malaqbiq**. Kami juga berharap agar kinerja kami dapat semakin baik di tahun yang akan datang maka dukungan dari berbagai pihak senantiasa kami harapkan. *Terima kasih.*

Mamuju, 24 Februari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Barat,**



Drs. Maddareski Salatin, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP. 19711214 199202 1 001

	Halaman
HALAMAN JUDUL	(i)
KATA PENGANTAR	(ii)
DAFTAR ISI	(iii)
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi.....	2
C. Analisis Perkembangan Strategi.....	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
B. Indikator Kinerja Utama.....	17
C. Perjanjian Kinerja.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	23
A. Kerangka Pengukuran Kinerja.....	23
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	23
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	25
D. Realisasi Anggaran.....	33
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan.....	35
B. Saran.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah dalam mewujudkan good governance dan clean government sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pelaporan Kinerja bertujuan memberikan Informasi capaian Kinerja yang terukur atas target kinerja yang diperjanjikan.

Seiring dengan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sulawesi Barat tahun 2017-2022 yang telah memasuki periode terakhir, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana tahun –tahun sebelumnya maka tahun 2022 juga melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja Utama dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolok ukur keberhasilan Dinas Perhubungan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, evaluasi program dan kegiatan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja dan sebagai wujud akuntabilitas terhadap pelaksanaan peran, tugas dan fungsi. Untuk memperoleh data dan bahan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan pada tahun berkenaan, untuk itu perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2022 , yang didasari tugas pokok dan fungsi.

B. Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2018 diuraikan tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Adapun uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok:

- a. Membantu gubernur melaksanakan perumusan, kebijakan, pengordinasian, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi urusan pemerintahan di bidang perhubungan meliputi Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Bidang Pelayaran dan Bidang Pengembangan Transportasi, Perkeretaapian dan Kebandarudaraan.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan Daerah sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan;
- c. Pembinaan dan fasilitasi di Bidang Perhubungan lingkup antar provinsi dalam provinsi dan kabupaten;
- d. Pemantauan, pengawasan evaluasi, monitoring dan pelaporan di Bidang Perhubungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat Dinas terdiri dari:
 - o Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - o Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri dari:
 - o Jabatan Fungsional (Sub Koord. Lalu Lintas Jalan);
 - o Seksi Angkutan;
 - o Seksi Terminal.
- d. Bidang Pelayaran terdiri dari:
 - o Seksi Kepelabuhanan;
 - o Jabatan Fungsional (Sub Koord. Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran);
 - o Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan ASDP.
- e. Bidang Pengembangan Transportasi Kebandarudaraan dan Perkeretaapain terdiri dari:
 - o Seksi Perkeretaapain;
 - o Seksi Kebandarudaraan dan Lingkungan Perhubungan;
 - o Jabatan Fungsional (Sub Koord. Pengembangan Sistem dan Multimoda).

Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat juga mempunyai 3 (tiga)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu:

- UPTD LLAJ Wilayah I Mamasa- Polewali Mandar
- UPTD LLAJ Wilayah II Mamuju- Majene
- UPTD LLAJ Wilayah III Mamuju Tengah- Mamuju Utara

Jenjang struktur yang tersedia pada lingkup Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat antara lain :

- Kepala Dinas 1 (satu) orang setingkat eselon II/a
- Sekretaris 1 (satu) orang dan Kepala Bidang sebanyak 3 (tiga) orang dengan jabatan setingkat eselon III/a
- Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi sebanyak 20 (dua puluh) orang dengan jabatan setingkat eselon IV/a

Adapun jenjang struktur pada ketiga UPTD, masing – masing terdiri dari :

- Kepala UPTD 3 (tiga) orang setingkat eselon III/a

C. Analisis Perkembangan Strategis

Kebutuhan pelayanan transportasi merupakan salah satu hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan pelayanan transportasi itu meningkat secara kualitas dan kuantitas dari waktu ke waktu sehingga tak sedikit timbul persoalan dalam penyelenggaraannya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan berhasil tumbuh 21,27 persen pada triwulan II-2022 jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/yoy). Sebelumnya, pada triwulan [1-2022](#) juga mengalami pertumbuhan positif mencapai 15,79 persen. Hal ini menunjukkan tren yang terus meningkat di sektor transportasi hingga triwulan kedua tahun 2022. Adanya pelanggaran kebijakan syarat perjalanan serta penanganan manajemen rekayasa lalu lintas pada masa mudik Lebaran tahun 2022 juga menjadi faktor pendorong pertumbuhan positif sektor transportasi pada triwulan kedua tahun 2022. Untuk menjaga momentum positif kinerja sektor transportasi, akan terus ditingkatkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan, yakni dengan Kementerian/Lembaga, BUMN, swasta, akademisi, media dan masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan dalam upaya mengatasi sejumlah tantangan yang ada di sektor transportasi, seperti: keterbatasan fiskal, meningkatnya kebutuhan pendanaan infrastruktur transportasi, belum optimalnya pelayanan transportasi yang terintegrasi, kurangnya tingkat kesadaran akan keselamatan transportasi, hingga pengembangan transportasi berkelanjutan yang ramah lingkungan guna menghadapi isu pemanasan

global dan perubahan iklim. Sebagaimana yang disampaikan di awal, Tahun 2022 merupakan tahun terakhir RPJMD Sulawesi Barat Tahun 2017-2022, ini berarti banyak hal yang perlu dievaluasi dalam pelaksanaan rencana pembangunan yang termuat dalam dokumen tersebut. Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai OPD yang bertugas dalam pelaksanaan kebijakan bidang perhubungan pada tahun 2022 ini juga terus melakukan upaya untuk dapat mewujudkan berbagai program kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan bidang transportasi.

1. Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2022, jumlah pegawai pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari 60 orang Pegawai Negeri Sipil dan 41 orang Pegawai Tidak Tetap.

Tabel 1. Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Eselon, Tahun 2022

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	ESELON II	1
2.	ESELON III	7
3.	ESELON IV	20
4.	NON ESELON	32
TOTAL		60

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Dari 60 (enam puluh) jumlah ASN tersebut di atas, sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang adalah pejabat struktural, terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 3 (tiga) orang Kepala Bidang, 3 (tiga) orang kepala UPTD dan 16 (enam belas) orang Kepala Sub Bagian/Seksi, serta 3 (tiga) pejabat Fungsional.

Tabel 2. Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Golongan, Tahun 2022

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	GOLONGAN IV	9
2.	GOLONGAN III	42
3.	GOLONGAN II	9
4.	GOLONGAN I	-
TOTAL		60

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Tabel 3. Jumlah ASN pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Tk. Pendidikan, Tahun 2022

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	STRATA 3	-
2.	STRATA 2	10
3.	STRATA 1	38
4.	DIPLOMA 3	4
5.	DIPLOMA 2	-
6.	DIPLOMA 1	-
7.	SLTA	8
8.	SLTP	-
TOTAL		60

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Tabel 4. Jumlah PTT dan Sukarela pada Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Berdasarkan Pendidikan, Tahun 2022

NO	PENDIDIKAN YANG DITAMATKAN	JUMLAH
1.	STRATA 2	-
2.	STRATA 1	7
3.	DIPLOMA 3	2
4.	SLTA	32
TOTAL		41

Sumber: Bagian Umum dan Kepegawaian Dishub Sulbar

Dengan menggunakan tolok ukur pendidikan formal serta mempertimbangkan tuntutan kompetensi dalam menangani bidang tugasnya, kualitas SDM masih sangat diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan. Tantangan peran organisasi kedepan untuk menunjang tugas dan fungsi organisasi semakin kompleks permasalahannya, sehingga kualitas SDM perlu ditingkatkan.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2022 tercatat sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas sebanyak 29 unit, terdiri atas kendaraan roda empat sebanyak 5 (lima) unit, dan kendaraan roda dua sebanyak 24 (dua puluh empat) unit;
2. Gedung Kantor dengan keterbatasan ruangan, kenyamanan dalam bekerja tetap diupayakan. Gedung kantor dilengkapi dengan *Air Condition* (AC) Split sebanyak 15 (lima belas) unit, *standing AC* sebanyak 3 (tiga) unit, meja kantor sebanyak 72 unit, kursi kantor sebanyak 254 unit, lemari kantor sebanyak 63 unit, *filling cabinet* sebanyak 5 unit, kipas angin sebanyak 6 unit, kulkas 2 (dua) unit, televisi 3 (tiga) unit, serta peralatan lainnya yang mendukung kegiatan tugas kantor seperti peralatan *cleaning service* dan lain-lain;
3. *Notebook* sebanyak 6 (enam) unit, komputer PC 36 (tiga puluh enam) unit, printer sebanyak 12 (dua belas) unit.
4. Kipas angin 5 (lima) unit.
5. Dispenser 3 (tiga) unit.

Selanjutnya pengadaan peralatan kantor untuk tahun anggaran 2022 terdiri dari Laptop 2 unit.

3. Lingkungan Strategis

Kemajuan suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak roda organisasi merupakan faktor internal yang berpengaruh langsung terhadap lingkungan strategis organisasi, khususnya di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan masih kurangnya tenaga ASN di lapangan sehingga Diklat – diklat dasar sangatlah dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan SDM bidang Perhubungan.

4. Lingkungan Internal

Faktor internal yang berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi organisasi, diantaranya adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan kelembagaan organisasi.

Melalui pencermatan terhadap lingkungan internal menghasilkan penemukenalan atas sejumlah potensi kekuatan (*potential internal strengths*) dan potensi kelemahan (*potential internal weaknesses*). Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat diidentifikasi beberapa faktor kekuatan dan kelemahan internal yang sangat mempengaruhi keberhasilan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

Analisa Kondisi Lingkungan Internal:

Kekuatan (*Strength*):

1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 147 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Administrasi dan Lembaga Teknis Operasional Daerah Provinsi Sulawesi Barat;
3. Peraturan Daerah / aturan-aturan intern lainnya.

Kelemahan (*Weakness*):

1. Struktur organisasi yang belum dapat mengoptimalkan mekanisme kerja;
2. Kualitas ASN yang masih terbatas terutama SDM Teknis Perhubungan;
3. Sarana dan fasilitas kerja yang belum memadai;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam bidang Perhubungan.
5. Aparatur masih lemah dalam penjabaran program – program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

5. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal merupakan cerminan peluang, tantangan atau ancaman yang dihadapi oleh Organisasi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Analisa Kondisi Lingkungan Eksternal :

Peluang (*Opportunities*):

1. Dukungan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat yang besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai pelaksana pembangunan infrastruktur.
2. Koordinasi dan kerjasama yang baik dengan lembaga terkait dan SKPD lain;
3. Banyaknya tawaran pengembangan SDM aparatur melalui pendidikan dan pelatihan;
4. Perkembangan Fasilitas Perhubungan khususnya terminal angkutan darat, pelabuhan laut dan bandar udara di Sulawesi Barat meningkat;
5. Kebijakan percepatan pembangunan sektor Infrastruktur Perhubungan di Sulawesi Barat.

Tantangan (*Threats*):

1. Sebagai sebuah daerah baru dengan ketertinggalan pembangunan dari daerah lainnya, membuat provinsi Sulawesi Barat berada dalam kondisi serba terbatas, baik dari segi sumber daya, sarana dan prasarana maupun infrastruktur;
2. Siklus/ keadaan iklim yang tidak menentu sangat mempengaruhi pelaksanaan pembangunan prasarana dan infrastruktur;
3. Tingginya harapan masyarakat terhadap percepatan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Barat.
4. Lahirnya paradigma baru yang dicapai melalui satu tahapan proses dalam dimensi waktu, yaitu terjadinya saling keterkaitan (interaksi), saling keterpaduan (interrelasi), dan saling membutuhkan (interdependensi) antar pranata (institusi dan regulasi) dari semua bidang kehidupan yang harus diantisipasi oleh Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).
5. Terjadinya konvergensi sistem teknologi yang melahirkan varian-varian baru teknologi interaktif dan saling bersinergi yang tujuannya diarahkan untuk meningkatkan mutu dan nilai tambah produksi nasional, baik untuk memenuhi kebutuhan berswasembada maupun untuk keperluan memperbesar peluang meningkatkan ekspor, yang merupakan tantangan bagi pengembangan

teknologi transportasi. Disamping itu dengan semakin langkanya energi fosil menuntut ditemukannya energi baru yang lebih sustainable sehingga memerlukan penyesuaian dalam teknologi transportasi.

6. Kecenderungan terpolanya lingkungan kerja masa depan yang sekaligus menggambarkan interaksi antar kegiatan dengan layanan antar moda transportasi yang saling terintegrasi secara kesisteman dalam bentuk transportasi multi moda.
7. Lingkungan kerja masa depan yang terbentuk akibat peran sentral teknologi transportasi, telah melahirkan realitas baru, yaitu nuansa keterhubungan global dengan mobilitas global antar sub sistem kegiatan.
8. Di dalam persaingan ekonomi global yang makin tajam dan diwarnai dengan kecanggihan teknologi transportasi sebagai wahana bagi terselenggaranya keterhubungan dan mobilitas global di pelbagai bidang kehidupan, akan dihadapkan kepada tuntutan yang semakin besar atas kecepatan, keandalan, efisiensi dan daya saing yang tinggi. Di dalam dunia yang semakin menyatu, jaringan fisik dan pelayanan transportasi nasional merupakan subsistem dari jaringan pelayanan regional dan global. Dengan demikian, pembangunan di sub sektor transportasi, harus memperlihatkan kompatibilitas jaringan nasional dengan jaringan global dalam suatu rangkaian keseimbangan pergerakan dengan kegiatan ekonomi yang andal dan efisien.
9. Dengan semakin berkurangnya sumber dana dari pemerintah (APBN), tantangan ke depan yang dihadapi adalah memanfaatkan dana-dana masyarakat dan membuka peluang kerjasama dengan badan usaha dalam penyelenggaraan dan pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Hal ini menuntut dilakukannya pelbagai penyempurnaan regulasi terutama yang berkaitan dengan struktur industri penyediaan sarana dan pra sarana transportasi. Kerjasama dengan badan usaha ditujukan untuk menyediakan infrastruktur transportasi guna memberikan pelayanan terhadap distribusi

komoditi perdagangan dan industri, serta pergerakan penumpang baik dalam lingkup nasional maupun internasional.

10. Sektor transportasi dituntut untuk semakin mampu berperan dalam mendukung pergerakan dan mobilitas orang, barang, dan jasa-jasa, membuka aksesibilitas ke daerah terpencil, daerah rawan bencana dan daerah perbatasan, juga harus berfungsi sebagai perekat dan jembatan guna mendukung tumbuhnya perekonomian nasional dan wilayah, serta sekaligus mempersempit kesenjangan pembangunan antar daerah. Transportasi makin dituntut untuk memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah, dalam kesesuaiannya dengan tata ruang, dan kelestarian lingkungan.
11. Pelaksanaan secara konsekuen pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan tugas umum di bidang pemerintahan dan pembangunan perhubungan, yang berorientasi pada: pertama, pencapaian tujuan nasional yang mengacu pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen-elemennya, seperti: legitimasi, akuntabilitas, hak asasi manusia, otonomi dan pembagian kewenangan serta terjaminnya hak pengawasan masyarakat. Kedua, pelaksanaan tugas dilakukan oleh aparatur negara secara efektif dan efisien sebagai upaya mencapai tujuan nasional. Kesemuanya ini merupakan tantangan bagi Departemen Perhubungan dalam rangka membentuk SDM yang memiliki kompetensi memadai dalam menyelenggarakan dan membangun sarana dan prasarana transportasi secara efektif dan efisien.
12. Peran SDM Dinas Perhubungan pada abad 21 sangat strategis, mengingat bahwa peran SDM dalam rangka menghadapi era globalisasi dan desentralisasi perlu dipersiapkan SDM yang berkualitas agar mampu menjawab tantangan transportasi masa kini dan masa yang akan datang. Tantangan dan tuntutan terhadap Perhubungan tidaklah mudah dan sederhana. Permasalahan dan kenyataan yang dihadapi oleh masing- masing

sub sektor perhubungan sangat kompleks dan dinamis, oleh karenanya perlu suatu perhatian dan pemikiran yang serius dengan komitmen yang kuat dalam menyiapkan dan meningkatkan kemampuan SDM terkait. Pemenuhan dan Peningkatan mutu SDM adalah suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi. Dengan demikian, maka Dinas Perhubungan perlu mempersiapkan program pendidikan dan pelatihan serta kaderisasi sejak dini agar diperoleh SDM yang kompeten, professional dalam bidang perhubungan. Proses penyiapan, pembentukan dan peningkatan SDM perlu senantiasa dilakukan dengan cara yang terencana, terarah, efektif, efisien dan optimal, serta berkelanjutan.

13. Perkembangan aktivitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat dalam segala bidang serta diiringi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah dan akan senantiasa memberikan dorongan pengaruh dalam paradigma perhubungan yang sesuai. Pada Perubahan paradigma sektor perhubungan, akan senantiasa diikuti dengan tuntutan terhadap peningkatan dan penyempurnaan diklat SDM Kementerian Perhubungan. Terlaksananya Desentralisasi dalam arti memberikan peran yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan bahwa perencanaan strategis makro masih tetap menjadi tanggung jawab pemerintahan pusat termasuk sektor prasarana. Departemen Perhubungan bertanggung jawab terhadap perencanaan strategis sektor transportasi untuk mencapai efisiensi nasional, menetapkan standar keselamatan, sertifikasi kelaikan operasi prasarana dan sarana, pengembangan sumber daya manusia serta optimasi pembiayaan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses awal dari rangkaian proses dalam usaha mencapai tujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi. Misi Ketiga RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2017-2022 yakni, ***Membangun dan Memperkuat Konektivitas antar Wilayah Berbasis Unggulan Strategis***. Yaitu Penguatan konektivitas nasional merupakan salah satu strategi yang ditempuh dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi nasional. Oleh karena itu, terdapat tiga prinsip konsep konektivitas. Pertama, memaksimalkan pertumbuhan melalui kesatuan kawasan, bukan keseragaman (inclusive development) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan. Kedua, memperluas pertumbuhan melalui konektivitas wilayah-wilayah melalui inter-moda supply chain system yang menghubungkan hinterland dan yang tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Ketiga, mencapai pertumbuhan inklusif dengan menghubungkan daerah terpencil dengan infrastruktur dan pelayanan dasar dalam mendapatkan manfaat pembangunan.

Dalam Rencana Strategis, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu organisasi. Rencana Strategis meliputi penetapan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara mencapai tujuan dan sasaran dengan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang berorientasi pada cita-cita masa depan yang lebih baik.

Dengan terbentuknya Provinsi Sulawesi Barat, maka tantangan kedepan semakin besar. Selain sumber daya alam dan sumber daya manusia, diperlukan suatu rencana yang matang dan terukur guna pencapaian tujuan pemerintahan provinsi. Era globalisasi menuntut provinsi untuk membentuk jaringan informasi dan telekomunikasi agar tidak tertinggal dan tersisih dari suatu kemajuan teknologi.

Pemerintah Provinsi harus memandang dirinya sebagai suatu perusahaan yang harus dapat mensejahterakan karyawannya yang dalam hal ini adalah masyarakat, dan sumber daya sebagai produk yang dapat dijual kepada provinsi tetangga.

Mencermati kondisi tersebut, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sebagai unsur pelaksana dan penunjang Pemerintah Daerah telah merumuskan serangkaian kegiatan kebijakan pembangunan yang sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, yang dituangkan dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat.

2.1.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

Pembangunan Transportasi pada Rencana Strategis Tahun 2017- 2022 di Provinsi Sulawesi Barat, bertujuan untuk :

1. Meningkatkan Pembangunan dan Penguatan Sistem Transportasi untuk Konektivitas Antar Wilayah;
2. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Kuantitas ASN untuk Penerapan Kepemerintahan yang baik.

Tujuan tersebut terjabarkan dalam 5 bidang, yaitu :

1. Meningkatnya Pembangunan dan Penguatan sistem Transportasi untuk Konektivitas Antar Wilayah;
2. Meningkatnya Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman;
3. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Transportasi;
4. Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi;
5. Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan;

Penyelenggaraan kegiatan transportasi yang efektif berkaitan dengan ketersediaan aksesibilitas, optimalisasi kapasitas, maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan pengembangan dan penerapan teknologi transportasi yang berdampak kepada peningkatan daya guna dan minimasi biaya yang menjadi beban masyarakat.

Sasaran pembangunan transportasi Sulawesi Barat jangka menengah tahun 2017-2022 adalah:

1. Ketepatan fungsi dalam pelayanan administrasi dalam menunjang tugas organisasi yang efektif, efisien dan terukur.
2. Kecukupan sarana prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas secara efektif, efisien dan berbasis teknologi informasi.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur berdasarkan prinsip cepat, pasti, mudah dan adil.
4. Terbentuknya karakter SDM Aparatur Perhubungan yang berintegritas, netral, *capable*, profesional dan berkinerja tinggi.
5. Meningkatnya akuntabilitas nilai Dinas Perhubungan melalui tersedianya dokumen perencanaan, pemograman, dokumen analisis dan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan.
6. Meningkatnya pelayanan, keselamatan dan keamanan transportasi.
7. Terbangunnya sarana dan prasarana penunjang transportasi yang dapat memberikan dukungan bagi perekonomian daerah yang berkelanjutan (*Sustainable Growth*).

Setiap sasaran dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

- Sasaran pertama, dapat diukur melalui indikator : Persentase ketepatan waktu pelayanan administrasi perkantoran.
- Sasaran kedua, dapat diukur melalui indikator : Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur.
- Sasaran ketiga, dapat diukur melalui indikator : Persentase Kesesuaian pekerjaan yang dibebankan kepada aparatur dengan kemampuan dan kompetensinya.
- Sasaran keempat, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah SDM operator prasarana dan sarana transportasi yang telah memiliki sertifikat;
 - b. Jumlah SDM fungsional teknis Dinas Perhubungan;

- c. Persentase pegawai peserta diklat yang dimanfaatkan sesuai dengan hasil diklat.
- Sasaran kelima, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan Dinas Perhubungan yang terselesaikan tepat waktu;
 - b. Nilai akuntabilitas keuangan dan kinerja Dinas Perhubungan berdasarkan hasil evaluasi BPK dan BPKP.
- Sasaran keenam, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Jumlah penumpang angkutan umum;
 - b. Rasio Ijin Trayek;
 - c. Jumlah Korban kecelakaan lalu lintas jalan dan sungai;
 - d. Jumlah fasilitas perlengkapan jalan (rambu, marka dan guardrail) dan penerangan jalan umum (PJU);
- Sasaran ketujuh, dapat diukur melalui indikator :
 - a. Rasio panjang jalan per kendaraan;
 - b. Jumlah angkutan darat;
 - c. Jumlah pelabuhan dan angkutan pelayaran;
 - d. Jumlah terminal berdasarkan tipe;
 - e. Jumlah bandar udara dan sarana pendukung lainnya.

2.1.2. Strategi

Dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi, serta mencapai tujuan dan sasaran seperti tersebut di atas, ditempuh melalui 7 pilar strategi pembangunan transportasi Sulawesi Barat sebagai berikut:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas di dalam pelayanan perizinan.
2. Penyusunan Rencana Kebutuhan sarana dan parasarana lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan.
3. Memperkuat kemampuan organisasi dinas dalam membangun budaya pelayanan prima.

4. Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan seluruh pegawai.
5. Melakukan konsolidasi dan penyesuaian perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi baik di tingkat kelembagaan yang horizontal dan vertikal.
6. Merencanakan secara berkala kebutuhan segala upaya keselamatan dan kemananan dalam bertransportasi.
7. Meningkatkan kualitas sarana transportasi dengan mempertimbangkan aspek keselamatan, keadilan, kepastian hukum dan kelestarian lingkungan dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan (*sustainable development*).

2.1.3. Kebijakan

Kebijakan Umum Dinas Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2017-2022) meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan standar kualitas layanan dan standar keamanan layanan terus ditingkatkan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
2. Mengoptimalkan penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.
3. Membuat publikasi pelayanan sesuai nilai atau motto instansi.
4. Mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana yang ada untuk peningkatan SDM.
5. Memperluas jejaring dan kerja sama di bidang perencanaan dan pengkajian transportasi pada tingkat provinsi dan kabupaten.
6. Mengembangkan skema insentif yang tepat dalam penciptaan iklim inovasi untuk mendorong perkuatan struktur industri transportasi.
7. Pelibatan peran serta swasta dalam transportasi perintis.

B. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu

menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja ini ditampilkan agar dapat menjadi bahan acuan dalam menetapkan dan mengukur indikator kinerja program dan kegiatan.

Tabel 2.1 IKU Dinas Perhubungan Tahun 2022

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN
1	2	3	4
Meningkatkan Pembangunan dan Penguatan Sistem Transportasi untuk Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Menggunakan Metode Skala Likert 1-5 (Kategori)
	Meningkatnya Layanan Angkutan Umum	Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	Menggunakan Metode Skala Likert 1-5 (Kategori)
	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Jumlah Kecelakaan Tahun Sebelumnya - Jumlah Kecelakaan Tahun Berjalan /Jumlah Kecelakaan Tahun Sebelumnya X 100%
	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan	Point (Penghitungan Dari Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat)

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi.

Sasaran Strategis pertama ini memiliki indikator kinerja yaitu tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi. Indikator ini dihitung melalui survey menggunakan metode Skala Likert 1-5 (Kategori). Survey ini ditujukan untuk mengetahui persepsi public terkait ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas transportasi yang ada di Sulawesi Barat seperti Terminal, Bandar Udara, Pelabuhan dan sarana serta fasilitas lainnya. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini maka diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.2 Program/Kegiatan Sasaran 1

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi.	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Baik	<i>Program Penyelenggaraan LLAJ.</i>	Pengelolaan Terminal penumpang Tipe B.
				<i>Program Pengelolaan Pelayaran.</i>	Penerbitan Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan Pelabuhan penyewaan peralatan, angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut tally mandiri dan depo peti kemas
					Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional
					Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional
					Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional
					Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Layanan Angkutan Umum.

Sasaran strategis ke dua ini memiliki indikator yaitu Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman. Indikator ini dihitung dengan melakukan survey menggunakan metode Skala Likert 1-5 (Kategori). Survey ini dilakukan untuk mengetahui persepsi publik terhadap layanan angkutan umum di Sulawesi Barat. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini maka diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.3 Program/Kegiatan Sasaran 2

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman.	Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	Baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Rapat-Rapat Koordinasi. 2. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten dalam 1 daerah provinsi

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Transportasi

Sasaran strategis ke tiga ini memiliki indikator yaitu Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Indikator ini dihitung dari Jumlah Kecelakaan Tahun Sebelumnya - Jumlah Kecelakaan Tahun Berjalan /Jumlah Kecelakaan Tahun Sebelumnya dikali 100%. Untuk mewujudkan sasaran strategis ini maka diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel. 2.4 Program/Kegiatan Sasaran 3

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi.	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.	1 %	Program penyelenggaraan LLAJ	Penyediaan Perlengkapan jalan di jalan provinsi Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan

Sasaran Strategis 4 : Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/ SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan

Sasaran strategis ke empat ini memiliki indikator yaitu Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/ SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan, indikator ini dihitung berdasarkan Point penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat .

Untuk mewujudkan sasaran strategis ini maka diharapkan dapat dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2.5. Program/Kegiatan Sasaran 4

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB) /SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Administrasi Barang Milik Daerah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Pemeliharaan barang Milik Daerah

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah / tanggungjawab/ kinerja. Dengan demikian, perjanjian kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat dapat kita lihat pada tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Baik
2.	Meningkatnya Layanan Angkutan Umum	Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	Baik
3.	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	1 %
4.	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan	A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam mengukur tingkat persentase capaian kinerja menggunakan 2 (dua) rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya, yaitu :

Rumus 1 : **Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik**, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Rumus 2 : **Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja**, rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase pencapaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

B. Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja antara Gubernur Sulawesi Barat dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022, telah dilakukan pengukuran kinerja dengan hasil sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 3.1
Kategori Pencapaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Interpretasi/Kategori Capaian Kinerja
1	86 - 100	Memuaskan
2	76 – 85	Sangat Baik
3	66 – 75	Baik
4	51 – 65	Cukup Baik
5	31 – 50	Agak kurang
6	0 – 30	Kurang

Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA	PREDIKAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Baik	Baik	100	Memuaskan
2	Meningkatnya Layanan Angkutan Umum	Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	Baik	Baik	100	Memuaskan
3	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	1 %	Naik 25%	-	Kurang
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan	A	B	82	Sangat Baik

Dari empat (4) SS terdapat 1 indikator yang hasilnya kurang, 1 indikator yang belum maksimal dan 2 indikator yang mencapai target, dan 4 indikator yang hasilnya sesuai yang disajikan dalam informasi sesuai tabel berikut:

Tabel 3.3
Predikat Nilai Capaian Kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022

No	Predikat	Jumlah Indikator SS	%
1	Memuaskan	2	100
2	Sangat Baik	1	82
3	Baik	-	-
4	Cukup Baik	-	-
5	Agak kurang	-	-
6	Kurang	1	0

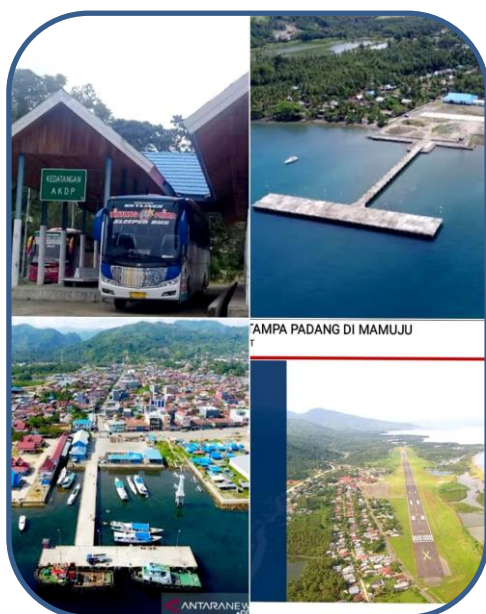
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Analisis merupakan proses mengurai suatu kondisi sehingga diperoleh pemahaman yang lebih mendalam akan suatu hal, berikut analisis capaian kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1, Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi..

Indikator 1 : Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi. Realisasi sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022
1	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi.	Baik	Baik



Pada tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah dibuat sebagai bagian dari perencanaan kinerja, telah melakukan survey yang bertujuan untuk mengetahui penilaian publik tentang tingkat ketersediaan sarana, prasarana dan fasilitas transportasi yang ada di Sulawesi Barat. Survey ini dilakukan menggunakan metode Skala Likert dengan 5 kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Buruk. Dari Hasil Survey tersebut diketahui, dari 110 responden/ sampel yang berpartisipasi, sebanyak 10% menjawab Sangat Baik, 51,8 % menjawab Baik, 24,6% Menjawab Cukup Baik, 10 % menjawab Kurang Baik dan 3,6 menjawab Buruk. Sebagai bagian dari upaya untuk terus meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas



transportasi di Sulawesi Barat, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat untuk tahun 2022 memprioritaskan untuk Lanjutan Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Mamuju Tengah, dan penyusunan Dokumen DED Rencana Pembangunan Terminal Tipe B Di Kabupaten Mamasa. Pembangunan Terminal Tipe B ini dilaksanakan secara bertahap/multi years disesuaikan dengan anggaran OPD.

Selain Pembangunan Terminal Tipe B, fasilitas dan sarana prasarana transportasi kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing instansi bidang perhubungan di Provinsi Sulawesi Barat. Sebagaimana yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, indikator kinerja dari sasaran strategis ini di dukung oleh 2 (dua) program yaitu pertama Program Penyelenggaraan LLAJ dengan Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B dan Sub kegiatan rencana Pembangunan Terminal Tipe B dengan jumlah anggaran Rp. 410.000.000, dan Sub Kegiatan Pembangunan Gedung Terminal dengan jumlah anggaran Rp. 949.080.718. Program ke 2 (dua) yaitu Program Pengelolaan Pelayaran dengan 5 (lima) kegiatan yaitu kegiatan Penerbitan Izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang jasa pengurusan transportasi angkutan perairan Pelabuhan penyewaan peralatan, angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut tally mandiri dan depo peti kemas, dengan dua (2) sub kegiatan pertama, Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin Usaha Jasa Terkait berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan, Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut Tally mandiri dan Depo Peti Kemas dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan anggaran Rp. 18.630.000, kedua, sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin Usaha Jasa Terkait berupa Bongkar Muat Barang, jasa Pengurusan transportasi angkutan perairan pelabuhan, Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut Tally mandiri dan Depo Peti Kemas, dengan anggaran sebesar Rp. 7.240.000. Kegiatan kedua yaitu Penetapan Rencana Induk dan Daerah

Lingkungan kerja (DLKR) Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional, dengan satu (1) sub kegiatan yaitu pelaksanaan penyusunan rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional dengan nilai anggaran Rp. 100.000.000. Kegiatan Ke 3 (tiga) yaitu Pembangunan, Penerbitan Izin pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dengan Sub Kegiatan Pengawasan pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 21.191.060. Kegiatan ke 4 (empat) yaitu Penerbitan izin Pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional dengan sub kegiatan pertama Fasilitasi pemenuhan persyaratan perolehan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 7.940.000 sub kegiatan ke dua yaitu Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin pengembangan pelabuhan pengumpan regional dengan anggaran sebesar Rp. 17.550.000. Kegiatan ke 5 (lima) yaitu Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) daerah lingkungan Kerja/DLKR daerah lingkungan Kepentingan/DLKP dalam Pelabuhan Pengumpan regional dengan sub kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) daerah lingkungan Kerja/DLKR daerah lingkungan Kepentingan/DLKP dalam Pelabuhan Pengumpan regional dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.760.000. Persepsi Publik ini akan terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Dinas Perhubungan Daerah provinsi Sulawesi Barat terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholders untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan. Selain itu rencana untuk tahun 2024 Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat akan menyusun Study Kelayakan Pembangunan Pelabuhan yang nantinya sebagai bagian dari rangkaian rencana Pembangunan pelabuhan untuk melayani kepentingan masyarakat di Sulawesi Barat.

Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Pelayanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman.

Indikator 1 : Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022
2	Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	Cukup Baik	Baik



Pada Tahun 2022, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan survey untuk mengetahui persepsi publik tentang tingkat layanan angkutan umum yang aman dan nyaman. Survey ini dilakukan menggunakan metode Skala Likert dengan 5 kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik dan Buruk Berdasarkan data, dari 110 responden/ sampel, 9,1 % menjawab Sangat Baik, 54,5 % menjawab Baik, 26,4 % menjawab Cukup Baik, 9,1 % menjawab Kurang Baik dan 0,9 % menjawab Buruk. Indikator kinerja dari SS ini didukung hanya oleh Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah yang di dalamnya kegiatan Rapat Koordinasi, dengan pagu anggarannya sebesar Rp. 711.156.682,-. Jika merujuk kepada kewenangan berdasarkan Undang_undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki fasilitas transportasi yang dikelola sendiri baik terminal, pelabuhan maupun Bandar Udara sehingga upaya upaya pelayanan transportasi di dorong melalui upaya koordinasi dengan pihak lain yang memiliki kewenangan. Pada tahun 2022 Pemerintah



Daerah Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan kerja sama dengan maskapai Susi Air dan City Link untuk memberikan pelayanan penerbangan rute Makassar-Mamuju-Balikpapan dan juga Bandara Sumarorong. Maskapai Susi Air melayani selama kurang lebih 5 Bulan sedangkan City Link melayani Rute Mamuju-Balikpapan sampai sekarang. kerjasama membuka Rute penerbangan yang baru akan terus diupayakan sesuai dengan kebutuhan daerah. Transportasi laut juga terus didorong untuk memberi pelayanan kepada masyarakat salah satunya dengan tetap membuka rute Pelayaran Tol laut dan Penyeberangan Ferry Mamuju-Balikpapan. Dinas perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat juga terus mendorong Rute/Trayek Angkutan Pelayaran yang baru sesuai kebutuhan masyarakat. Begitupun dengan transportasi darat baik AKDP maupun AKAP terus dilakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder dan dilakukan pengawasan untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat bekerjasama dengan Perum DAMRI Sulawesi Barat bekerjasama memberikan pelayanan yang baik baik masyarakat. Persepsi Publik tentang Tingkat layanan angkutan umum ini akan terus ditingkatkan sebagai upaya pelayanan yang baik kepada masyarakat.

Sasaran Strategis 3, Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi

Indikator 2 : Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas. Realisasi sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022
3	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas.	634	797



=Pada tahun 2021, tingkat Kecelakaan Lalu Lintas sebanyak 634 kali, dan pada tahun 2022 mengalami kenaikan 797 kali atau naik 25,7 % . Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Indikator Kinerja Utama menjadikan penurunan tingkat kecelakaan lalu lintas sebagai sebuah indikator yang penting untuk selalu diturunkan dari tahun ke tahun. Di tahun 2022 ada kenaikan yang cukup tinggi jika dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipicu oleh pelonggaran syarat perjalanan orang dalam negeri yang tahun sebelumnya diperketat akibat covid-19. Pada Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis ini didukung oleh Program Penyelenggaraan LLAJ dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama, kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi dengan sub kegiatan kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi jumlah anggaran sebesar Rp. 198.374.800,,-. Kedua, kegiatan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. Pada kegiatan ini terdapat tiga (3) sub kegiatan, pertama, sub kegiatan penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi, dengan nilai pagu Rp. 398.330.000,-. Kedua, sub kegiatan



pengawasan dan Pengendalian efektivitas Pelaksanaan kebijakan untuk Jalan Provinsi dengan nilai Pagu sebesar Rp. 83.960.000. Sub Kegiatan ke tiga yaitu Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk jaringan jalan provinsi dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 44.400.000,-. Kegiatan ke tiga adalah Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di jalan. Pada kegiatan ini ada dua sub kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja sasaran, yang pertama sub kegiatan pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi pengemudi Kendaraan Bermotor provinsi dengan nilai anggaran sebesar Rp 50.000.000,-. Sub kegiatan ke dua (2) adalah pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,-

Untuk menekan tingkat kecelakaan lalu lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun Anggaran 2022, telah dilaksanakan beberapa kegiatan audit terkait dengan perizinan angkutan/ kendaraan yang bertujuan untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan dan kepatuhan terhadap perizinan yang ada.. Kegiatan ini dilaksanakan di tiga kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yaitu kabupaten Polman, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu. Kegiatan ini juga melibatkan Instansi terkait seperti pihak Kepolisian dan Jasa Raharja. Selain Kegiatan Audit, Juga dilaksanakan kegiatan pemasangan Perlengkapan Jalan berupa LPJU di



Ruas Jalan Provinsi di Kabupaten Pasangkayu guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Permasalahan yang diidentifikasi sebagai pemicu masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah antara lain : (1). masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan keselamatan berlalu lintas, (2). masih kurangnya fasilitas keselamatan jalan yan ada, (3). masih Tingginya titik-titik kecelakaan yang perlu mendapatkan perhatian, serta (4). pengawasan terhadap kelayakan kendaraan masih kurang.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan.

Indikator: Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan. Realisasi sebagai berikut:

No.	Indikator Kinerja	Realisasi	
		2021	2022
1	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan	B	B

Indikator ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan tuju (7) kegiatan dan 28 sub kegiatan pendukung total anggaran belanja pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 7.037.040.343,-, terdiri dari anggaran gaji dan tunjangan PNS dan belanja rutin sekretariat lainnya. Pada tahun 2022, hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat untuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 untuk pemeriksaan tahun tahun 2020, nilai SAKIP Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat adalah 62,60 poin dengan kategori B. pada tahun 2022 untuk pemeriksaan tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu 69,50 poin dengan kategori B.

Tabel Capaian Perolehan SAKIP Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021-2022

NO	KOMPONEN	BOBOT		NILAI PEROLEHAN	
		2021	2022	2021	2022
1	Perencanaan Kinerja	30	30	22,40	24,00
2	Pengukuran Kinerja	25	30	16,25	19,00
3	Pelaporan Kinerja	15	15	9,02	7,75
4	Evaluasi Internal	10	25	2,87	18,75
5	Capaian Kinerja	20	-	12,06	-
	Jumlah	100	100	62,60	69,50

Pada Perjanjian Kinerja tahun 2022 target indikator kinerja pada sasaran kinerja ini adalah A. target tersebut belum dapat tercapai disebabkan oleh beberapa hal diantaranya komponen Pelaporan Kinerja yang nilainya 7,75 dari bobot 15 Poin, Pengukuran Kinerja 19 poin yang nilai bobotnya 30 poin dan Evaluasi Kinerja yang capaiannya 18,75 dengan bobot 25 point. Berdasarkan hasil reuiu ada beberapa hal yang masih perlu dilakukan perbaikan diantaranya, (a) pengukuran data kinerja atas rencana aksi belum dilakukan secara berkala, (b) pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi, (c) kemajuan dan pencapaian kinerja beserta hambatannya belum dipantau secara berkala dan (d) informasi kinerja belum digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja. Hal ini tentu akan menjadi perhatian khusus buat OPD agar dalam pelaksanaan kinerja tahun selanjutnya dapat ditingkatkan lagi sesuai apa yang menjadi catatan dari Inspektorat daerah provinsi Sulawesi Barat.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi APBD Tahun 2022 Dinas Perhubungan Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:

- ❖ Belanja Pegawai (gaji dan tunjangan serta belanja rutin), Pagu Anggaran = 7.937.040.343,00 Realisasi Belanja = 7.840.822.920,00 atau sebesar 98,79%
- ❖ Belanja Operasional, Pagu anggaran = 2.443.456.580, 00
Realisasi Belanja Operasional = 2.347.705.569, 00- atau sebesar 96,08%.
- ❖ Total Pagu sebesar **10.380.496.921,00** dengan realisasi sebesar **10.188.528.489, 00** atau sebesar **98, 15 %**

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran

NO.	SASARAN STRATEGIS	IKU	PROGRAM	PAGU (RP)	REALISASI (RP)
1	Meningkatnya Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Tingkat Ketersediaan Sarana, Prasarana dan Fasilitas Transportasi	Program Penyelenggaraan LLAJ	1.359.080.718	1.286.358.717. (94,65%)
			Program Pengelolaan Pelayaran	179.311.060	175.507.162. (97,88%)
2	Meningkatnya Layanan Angkutan Umum	Tingkat Layanan Angkutan Umum yang Aman dan Nyaman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	711.156.682	709.416.791. (99,76%)
3	Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Transportasi.	Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan LLAJ	805.064.800	785.896090 (97,61%)
4	Meningkatnya Pengelolaan Organisasi Lingkup Dinas Perhubungan	Nilai Reformasi Birokrasi (RB)/SAKIP Lingkup Dinas Perhubungan	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	7.937.040.343	7.840.822.920.(98,79%)

BAB IV P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator, terdapat 3 (tiga) indikator yang memiliki kategori efisien, dan 1 (satu) indikator tidak efisien. Program kegiatan yang telah dilaksanakan pada dokumen perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat secara garis besar semua program kegiatan mendukung pencapaian target kinerja OPD. Dari dokumen rencana kerja terdapat 4 (empat) program yang mendukung pencapaian target IKU OPD tahun anggaran 2022. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator yang tidak efisien pencapaian kinerjanya yaitu Persentase Penurunan Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas dan satu indikator yang belum tercapai maksimal yaitu capaian nilai SAKIP OPD. Hal ini disebabkan oleh karena pertama, tingkat kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan salah satu penyebabnya adalah karena adanya peningkatan mobilisasi masyarakat dengan tidak diberlakukannya pembatasan aktivitas masyarakat yang ketat terhadap pencegahan covid-19 seperti tahun sebelumnya. Selain itu, peningkatan kecelakaan juga ini dipicu masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang keselamatan di jalan raya. Kedua indikator pencapaian yang belum maksimal adalah Nilai SAKIP OPD yang belum mencapai target yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya beberapa poin penilaian yang terkait dengan RB/ SAKIP OPD, mulai dari perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan kinerja OPD.

Dari segi jumlah anggaran yang tersedia untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 7.937.040.343 realisasi keuangan Rp. 7.840.822.920 - (98,79 %) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 97.817.423- dan Belanja operasional/teknis sebesar Rp 2.443.456.578- realisasi keuangan Rp 2.347.705.569 (96,08%) dengan sisa anggaran sebesar Rp. 95.751.009.

B. Saran.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022, khususnya terhadap masalah atau hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah sbb:

1. Perlu dilakukan support alokasi anggaran untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat, agar dapat mencapai target daerah sesuai yang telah direncanakan.
2. OPD terus mendorong peningkatan kapasitas SDM Bidang Perhubungan dengan melakukan koordinasi yang intens dengan berbagai pihak dalam hal pengembangan SDM.
3. OPD terus mendorong dan melakukan koordinasi dengan semua stakeholder untuk meningkatkan pelayanan dalam Bidang Perhubungan.
4. Laporan Evaluasi kinerja ini sebaiknya menjadi acuan dalam pengambilan keputusan terkait perencanaan dan penganggaran OPD terutama terhadap target yang belum tercapai.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2022 ini disampaikan, sebagai bahan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam laporan ini, untuk itu saran dan kritik dari berbagai pihak sangat kami harapkan guna meningkatkan kualitas LKjIP pada tahun-tahun berikutnya.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita sekalian dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan di masa yang akan datang.

Mamuju, 24 Februari 2023
Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi Sulawesi Barat,



Drs. Mardreski Salatin, M. Si
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. 19711214 199202 1 001